



Penggunaan SAKIP Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Kecamatan Genteng

Zahrotul Arofah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Muhammad Roisul Basyar

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: zahrotularofah2@gmail.com

Abstract. *The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) is a tool used by the government to fulfill its obligations to account for what has been done while carrying out organizational duties, which consists of several parts, namely strategic planning, performance planning, performance measurement, and performance reporting. As stated in Permen PAN-RB No.12 of 2015, these components include: 1) Planning; 2) Performance Measurement; 3) Performance Reporting; 4) Performance Evaluation. This research is descriptive research with a qualitative approach that has a research focus, namely: how the influence of the Government Agency Performance Accountability System and inhibiting factors in realizing Good Governance on the implementation of performance measurement. Data obtained from the results of observation, interviews and documentation at the research location. The results showed that the influence of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) in realizing Good Governance on performance measurement in Genteng District can increase accountability in the management of public resources, with a clear system for measuring and reporting performance, government agencies become more open and responsible for the use of public funds. Information that is openly available can allow the public to monitor and evaluate government performance which in turn can increase public trust.*

Keywords: *Performance Accountability System for Government Agencies, Good Governance, Performance Measurement.*

Abstrak. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajibannya mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama menjalankan tugas organisasi, yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagaimana tercantum dalam Permen PAN-RB No.12 Tahun 2015, komponen-komponen tersebut meliputi: 1) Perencanaan; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Kinerja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memiliki fokus penelitian, yaitu: bagaimana pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan faktor-faktor penghambat dalam mewujudkan Good Governance terhadap pelaksanaan pengukuran kinerja. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan Good Governance pada pengukuran kinerja di Kabupaten Genteng dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik, dengan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja yang jelas, instansi pemerintah menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Informasi yang tersedia secara terbuka dapat memungkinkan publik untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Kata kunci: Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, tata kelola yang baik, pengukuran kinerja.

PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang terukur dan

legitimate sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good Governance (Saputra & Nugroho, 2021) merupakan istilah yang tengah naik ke publik dalam waktu dekade belakangan ini. Governance adalah suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Maka Good Governance sendiri merupakan suatu sistem nilai, kebijakan dan kelembagaan yang mengedepankan sifat keterbukaan transparansi dan nilai-nilai baik dalam menjalin interaksi terhadap segala sektor publik. Salah satu cara yang dikembangkan pemerintah untuk membantu terwujudnya penerapan Good Governance adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Keberhasilan SAKIP menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah untuk mencapai Good Governance (Suwarno & Marwanto, 2021).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Andriani et al., 2015) merupakan alat yang dipergunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama melaksanakan tugas organisasi, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran prestasi, dan pelaporan kinerja. Dibahas dalam Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999, telah disebutkan bahwa tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Beberapa fenomena permasalahan yang timbul seiring dengan diimplementasikannya SAKIP antara lain adanya paradigma yang keliru dari aparatur pemerintah bahwa keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan yang dilaksanakan hanya berdasarkan penyerapan anggaran, penyusunan LAKIP yang dianggap sebagai formalitas dan rendahnya kualitas substansi, keakurasian informasi, dan pengukuran kinerja pemerintah yang dilaporkan pada LAKIP, sehingga hal inilah yang kemudian mengakibatkan sulitnya menyusun LAKIP (Ayuningtyas et al., 2018).

Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat ini yaitu adanya pemikiran aparatur pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar. Padahal untuk dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan organisasi seluruh aktivitas organisasi

harus dapat diukur dan indikator pengukuran tidak hanya berdasarkan pada input tetapi juga berdasarkan kepada keluaran atau manfaat dari suatu program/kegiatan.

Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, dapat memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan pengukuran kinerja serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru. Dengan adanya pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil (results) yang diperoleh (Maolani et al., 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta faktor penghambat dalam mewujudkan Good Governance terhadap penerapan pengukuran kinerja pada Kecamatan Genteng sehingga dapat menjadi alat pemangku kepentingan yang efektif terkait implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam meningkatkan Good Governance di sektor publik.

KAJIAN TEORITIS

1. Good Governance

Menurut Mardiasmo (Journal, 2015) yang dikutip oleh World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran, salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Sedangkan Good Governance menurut (United Nation Development Programme) :

- a. Akuntabilitas (Accountability)
- b. Partisipasi Masyarakat (society Participation)
- c. Transparansi (Transparency)
- d. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effektiviveness)
- e. Kesetaraan (Equality)
- f. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)
- g. Visi Strategis (strategic Vision)

- h. Responsif (Responsiveness)
- i. Berorientasi pada Konsensus (Consensus Orientation)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta faktor penghambat dalam mewujudkan Good Governance terhadap penerapan pengukuran kinerja. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan utama penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif adalah untuk berkontribusi terhadap mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance yang diperkuat melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dalam penerapan pengukuran kinerja dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terkait Pengaruh Implementasi SAKIP Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Penerapan Pengukuran Kinerja, maka dapat diuraikan hasil dan pembahasan berikut.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan alat yang dipergunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukan selama melaksanakan tugas organisasi, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran prestasi, dan pelaporan kinerja.

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Permen PAN-RB No. 12 tahun 2015 :

- a. Perencanaan : Proses penyusunan perencanaan kinerja membutuhkan waktu yang cukup lama namun dapat diselesaikan tepat waktu oleh para pegawai. Selain itu, dalam proses perencanaan strategis terdapat beberapa hambatan seperti adanya keterbatasan waktu dalam penyusunan dan aplikasi yang digunakan seringkali lambat.
- b. Pengukuran Kinerja : Pengukuran kinerja di Kecamatan Genteng sudah terlaksanakan dengan baik. Kinerja dapat diukur melalui realisasi dan target yang sudah ditentukan pada awal tahun yang sudah tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK).

- c. Pelaporan Kinerja : Para staff/pegawai Kecamatan Genteng telah mengumpulkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan adanya target waktu dari pihak terkait.
- d. Evaluasi Kinerja : Hasil evaluasi LAKIP Kecamatan Genteng Tahun 2023 memperoleh kategori “Sangat Baik”. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hasil evaluasi adalah komitmen perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, inovasi kegiatan tiap bidang, keterlibatan para pegawai dalam melaksanakan program serta sarana prasarana yang mendukung.

Prinsip-Prinsip Good Governance (United Nation Development Programme) :

a) Akuntabilitas (Accountability)

Merupakan kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Pertanggungjawaban Kecamatan Genteng kepada publik dan lembaga-lembaga mengenai sasaran dan program melalui LAKIP telah terlaksana dengan tepat waktu. Hal ini dikarenakan Para pegawai mempunyai komitmen dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan.



Gambar 1 Website Lakip atau Sakip

b) Partisipasi Masyarakat (society Participation)

Merupakan setiap orang memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kepentingan aspirasinya.

Partisipasi dapat dilihat dari program maupun kegiatan Kecamatan Genteng yang sangat melibatkan masyarakat. Salah satunya program Garage Day yang dilaksanakan secara serentak di 31 Kecamatan di Kota Surabaya.



Gambar 2 Dokumentasi Garage Day

c) Transparansi (Transparency)

Merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Para staff/pegawai Kecamatan Genteng telah transparan kepada publik dalam menyajikan informasi mengenai sasaran dan target yang telah termuat pada Rencana Strategis (Renstra) OPD.



Gambar 3 Dokumen Renstra OPD

d) Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness)

Merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu, sedangkan efektivitas merupakan tingkat capaian hasil program dan target yang ditetapkan.

Efektivitas dan Efisiensi dapat dilihat dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun anggaran 2023. Realisasi keuangan anggaran sebesar 97,4% yang artinya efisien dalam penggunaan dan efektif dalam melaksanakan tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan.

e) Kesetaraan (Equality)

Kesetaraan yang menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Kesetaraan memastikan bahwa semua instansi pemerintah memiliki akses yang sama terhadap SDM yang diperlukan dan memenuhi standar.



Gambar 4 Website e-sdm

f) Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)

Merupakan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum.

Kepastian hukum dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

g) Visi Strategis (strategic Vision)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang dan memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Visi stratejik telah dijelaskan pada rencana stratejik yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD yakni sebagai pedoman pelaksanaan selama 5 (lima) tahun kedepan. Semua yang telah dijabarkan merupakan sebagai tujuan tercapainya kinerja yang maksimal bagi OPD.

h) Responsif (Responsiveness)

Merupakan prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.

i) Berorientasi pada Konsensus (Consensus Orientation)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan proses musyawarah melalui konsensus. Karena paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Konsensus dapat mengacu pada kesepakatan atau pemahaman bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai tujuan, proses, dan hasil SAKIP serta pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja adalah merupakan suatu system yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan nonfinancial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga sasaran, antara lain :

- 1) Sasaran pengukuran kinerja ditujukan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.

Ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sector publik dalam pemberian pelayanan publik.

- 2) Sasaran ukuran kinerja ditujukan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Sasaran ukuran kinerja ditujukan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Oleh pihak legislatif, ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan (*cost of service*) yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa publik. Masyarakat tentu tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Masyarakat menghendaki pemerintah dapat memberikan banyak pelayanan dengan biaya yang murah (*do more with less*). Kinerja sector public bersifat multi dimensional, sehingga tidak ada indicator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda

dengan sector swasta, karena sifat output yang dihasilkan sector publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran financial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sector public. Oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran kinerja non finansial (Sri Lestari & Roy Valiant Salomo, 2022).

Penelitian ini memberikan hasil bahwa Penerapan SAKIP yang diterapkan oleh Kecamatan Genteng memberikan kinerja yang tinggi dalam diri aparatur. Tingkat kinerja ASN yang tinggi juga akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Surabaya. Menurut Riyadi dan Yulianto (2014) manfaat yang muncul adalah hasil positif yang diberikan oleh ASN terhadap Kinerja yang dilaksanakan. Penelitian ini mendukung teori dari Novatiani (2018) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah (Novatiani, 2018). Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Untuk melakukan pengukuran kinerja, pemerintah memerlukan informasi akuntansi terutama menentukan indikator kinerja (performance indicator) sebagai dasar penilaian kinerja. Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengukuran kinerja apabila tidak ada indikator kinerja yang memadai (Engkus et al., 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan Good Governance terhadap pengukuran kinerja pada Kecamatan Genteng dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya public, dengan adanya system yang jelas untuk mengukur dan melaporkan kinerja, instansi pemerintah menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana public. Informasi yang tersedia secara terbuka dapat memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan public.

Terciptanya pengukuran kinerja yang terstruktur, intansi pemerintah dapat mengidentifikasi area-area di mana efisisensi dan efektivitas dapat ditingkatkan sehingga hal ini dapat membantu dalam alokasi sumber daya yang lebih baik dan pencapaian hasil yang lebih optimal, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan public.

Adapun faktor penghambatnya dapat dilakukan beberapa hal juga yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan mengadakan program yang aktif dan ikut serta melibatkan masyarakat, serta mengupayakan hambatan-hambatan yang ada dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar dapat mencapai Good Governance dan meningkatkan pengukuran kinerja di sektor public.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. *Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 51–60. <https://doi.org/10.30630/jam.v10i2.105>
- Ayuningtyas, D. W., Studi, P., Keimigrasian, A., & Imigrasi, P. (2018). Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan. *Politeknik Imigrasi*, 2(1), 1–13.
- Engkus, Zahra, A., Yusmi, A. J., & Maulida, D. (2023). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 18–26.
- Journal, I. I. (2015). *IIPA-The Indonesian Journal of Public Administration*. *Public Administration*, 1(1), 72–88.
- Maolani, D. Y., Septriadi, A., Dewi, A. P., & ... (2023). Peran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Instansi Pemerintah. *Distingsi: Journal of ...*, 1(2), 31–35. <https://jurnal.panengen.com/index.php/djods/article/view/33%0Ahttps://jurnal.panengen.com/index.php/djods/article/download/33/34>
- Saputra, N., & Nugroho, R. (2021). Good Governance Pada Pelayanan Publik: Sebuah Usulan Model Pengembangan Berbasis Perilaku. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 9(1), 11–26. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v9i1.1559>
- Sri Lestari, & Roy Valiant Salomo. (2022). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 798–808. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2854>
- Suwarno, S., & Marwanto, H. (2021). Pengaruh Penerapan Sakip Terhadap Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Intervening. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 9(2), 1–14. <https://doi.org/10.37304/jispar.v9i2.1508>